

PENGEMBANGAN WISATA HUTAN ADAT IMBO PUTUI DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG

Rika Enjelina Simatupang¹, Mayarni²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Correspondent author: rikaenjelina.com@gmail.com

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272, Indonesia

Abstract

The first customary forest in Riau to receive state recognition was the Imbo Putui Forest. In Petapahan village, customary forests are managed according to their customs. Adat is the standard rule of the Petapahan community in regulating and utilizing the climate. Imbo's customary forest potential is very likely to be developed. The purpose of this research is to describe tourism development and the factors that hinder the development of Imbo Putui customary forest tourism. Cooper's development theory consists of four parts institutional, accessibility, amenity, and attractiveness. This type of research is descriptive. This study found that the development of the Imbo Putui customary forest has been carried out, but has not been optimal. The planned activities are going well, but the development is not done properly, such as facilities and accessibility. As well as the inhibiting factors. The budget that hinders development requires a long process and the lack of human resources to participate in the development of customary forests is an obstacle.

Keywords: *customary forest; development; imbo putui; tourism*

Abstrak

Hutan adat pertama di Riau yang mendapat pengakuan negara adalah hutan Imbo Putui. Di desa Petapahan, hutan adat dikelola sesuai adatnya. Adat menjadi aturan baku masyarakat Petapahan dalam mengatur dan memanfaatkan iklim. Potensi hutan adat Imbo sangat mungkin untuk dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan wisata dan faktor-faktor yang menghambat pengembangan wisata hutan adat Imbo Putui. Teori pengembangan Cooper, yang terdiri dari empat bagian, adalah kelembagaan, aksesibilitas, amenitas, daya tarik. Jenis penelitian ini kualitatif bersifat deskriptif. Kajian ini menemukan bahwa pengembangan hutan adat Imbo Putui telah dilakukan, namun belum optimal. Kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik, namun pengembangannya tidak dilakukan dengan benar, seperti fasilitas dan aksesibilitas. Serta faktor penghambatnya Anggaran yang menghambat pengembangan, membutuhkan proses yang panjang serta kurangnya sumber daya manusia untuk berpartisipasi dalam pengembangan hutan adat menjadi penghambat.

Kata Kunci: *, hutan adat; imbo putui; pengembangan, wisata*

PENDAHULUAN

Hutan adat Imboi Putui di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, merupakan salah satu hutan yang tersisa di Provinsi Riau. Pasalnya, kawasan seluas 251 hektare itu ditetapkan sebagai hutan adat pada 21 Februari 2020. Keputusan itu diambil Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim di Kabupaten Siak, Riau. Hutan adat pertama di Riau yang mendapat pengakuan negara adalah hutan Imbo Putui. Hutan ini sebelumnya disebut sebagai hutan terlarang sebelum disahkan sebagai hutan adat. Karena masyarakat biasa memanfaatkannya sesuai kebutuhan, maka hutan ini hanya dijaga, dan siapa saja boleh memanfaatkannya untuk apa saja. Namun, karena penekanan pada pengembangan hutan setelah hutan adat dilegalkan, pemanfaatannya menjadi terbatas. Hutan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan ternyata faktanya tidak, dikarenakan pengunjung yang tidak datang setiap hari sehingga membuat pengelola tidak menganjurkan berjualan. Dan juga memang dalam mengenalkan hutan adat Imbo Putui pengelola sendiri belum membuka atau grand opening, promosi yang seharusnya bisa dilakukan dengan mengenalkan pada masyarakat namun tidak dilakukan. Oleh karena promosi yang dilakukan terbatas hanya dari mulut ke mulut.

Hutan adat Imbo Putui tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Kenegerian Petapahan. Adat Istiadat Kenegerian Petapahan fokus pada hutan adat tersebut dan ekosistem sungainya. Nenek moyang mereka meninggalkan tradisi yang akan diteruskan oleh anak cucu mereka. Setiap pelanggaran adat diharapkan ada sanksi adatnya. Sehingga negara tidak akan bisa menantang adat ini karena sudah ada sebelum negara.

Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Adat Imbo Putui



Sumber: Lembaga Pengelola Hutan Adat, 2022

Pada gambar 1. hutan adat ini dikelilingi oleh perkebunan dan tanaman pertanian. Hutan adat Imbo Putui merupakan kawasan hutan adat dengan ekosistem yang terjaga kelestariannya dan masih dalam kondisi baik, sehingga dapat dibagi menjadi beberapa zona. Hutan adat Imbo Putui sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi baru.

Hutan tersebut dapat dikunjungi pada bulan Mei 2020. Data pengunjung hutan adat dari tahun 2020 hingga 2022, sebagai berikut:

Tabel 1. Pengunjung Hutan Adat Imbo Putui

Tahun	Jumlah Pengunjung
2020	± 500 orang
2021	± 1000 orang
2022	± 2000 orang

Sumber: Olahan peneliti 2022

Berdasarkan Tabel 1. Sebagaimana dapat dilihat di atas, masyarakat yang banyak berkunjung ke hutan adat Imbo Putui. Ditambah fakta bahwa jumlah pengunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa meskipun demikian, orang-orang tetap tertarik dengan hutan ini. Tentunya pengembangan lebih lanjut akan berdampak positif. Alhasil, adanya sarana dan prasarana yang lebih lengkap, selain adat istiadat masyarakat yang ada merupakan penunjang pembangunan.

Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA), Tokoh Adat, dan Pemerintah Desa telah merencanakan kegiatan pengembangan yang masih dilaksanakan dan sedang dalam proses pembangunan. Kegiatan di hutan adat, sebagai berikut :

Tabel 2. Kegiatan di Hutan Adat Imbo Putui

No.	Kegiatan di Hutan Adat Imbo Putui
1.	Destinasi Ekowisata
2.	Camping
3.	Menjelajah Hutan
4.	Budidaya Tanaman Hutan
5.	Budidaya Madu Kelulut
6.	Program Adopsi Pohon

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Pada tabel 2. diatas merupakan kegiatan di hutan adat yang masih terus berlangsung. Dimana hal tersebut menjadi daya tarik utama di hutan adat adalah kegiatan atau program ini. Dalam menjalankan kegiatan tetap memperhatikan adat istiadat masyarakat desa Petapahan.

Datuk Pucuk (Ninik Mamak) dan Lembaga Pengelola Hutan Adat sepakat sungai air di hutan wisata itu merupakan objek wisata yang tentunya bisa mendatangkan uang. Dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk dapat melihat keindahan hutan adat tanpa

khawatir akan terlalu mahal. Harga tiket masuk *Camping Ground* Ekowisata Imbo Putui berkisar Rp. 15.000 per individu dan Rp 10.000 per individu untuk pengunjung harian, dengan parkir mulai dari Rp. 5000-Rp. 10.000. Kecuali saat tamu ingin menyewa barang seperti ayunan dan tenda. Gratis untuk pengaturan sejauh ini. Namun, jumlah tersebut berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 jika dipadukan dengan perlengkapan untuk bermalam, seperti tenda, tikar, dan barang-barang lainnya. Saat ini, puluhan orang berkunjung setiap harinya, yang mayoritas adalah warga Petapahan dan kecamatan terdekat. Namun, pada akhir pekan, jumlahnya mungkin 50 hingga 100 orang. Dan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana masyarakat dapat berjualan dan menambah penghasilan. Namun hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat Imbo Putui pada zona pemanfaatan tidak meningkatkan kesejahteraan dikarenakan tidak adanya orang berjualan.

Pengelola hutan adat Imbo Putui memberikan penjelasan tentang hukum adat berupa "larangan" mengenai pemanfaatan Hutan Adat Imbo Putui, antara lain:

1. Tanpa seizin ketua adat penanggung jawab hutan adat imbo putui dilarang menebang pohon.
2. Penjualan komersial kayu dari hutan adat dilarang.
3. Perburuan hewan di dalam hutan adat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Ninik Mamak di Hutan Adat harus memberikan ijin sebelum dapat memanfaatkan hutan tersebut.
5. Merusak hutan adat dan flora yang hidup di dalamnya adalah melawan hukum.
6. Tidak dapat memasuki hutan adat tanpa izin pengelola.
7. Di hutan adat, baik norma agama maupun norma adat untuk berbicara menghina atau bertindak negatif. *Sumber : Lembaga Pengelola Hutan Adat, 2022*

METODOLOGI

Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Rizal et al.,(2018) penelitian subyektif adalah metode penyelidikan yang menghasilkan informasi yang jelas dalam bentuk esai atau wacana serta cara-cara berperilaku yang diamati orang dalam setting tertentu dan dilihat dari sudut pandang yang mencakup segala hal. , pakar komprehensif. Pendekatan studi kasus diambil dalam penelitian ini. Studi kasus adalah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap individu tertentu, kelompok, organisasi, program kegiatan, atau kelompok lain pada waktu tertentu.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini ialah Observasi yang diteliti. Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh,

dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan Hutan Wisata Tradisional Imbo Putui di Desa Petapahan Kecamatan Tapung (abdussamad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Wisata Hutan Adat Imbo Putui di Desa Petapahan Kecamatan Tapung

Kajian ini mengkaji pengembangan wisata hutan adat. Penulis memanfaatkan konsep teoritis yang dikemukakan oleh Cooper dalam (Fardhuni, 2020) untuk menyoroti masalah yang akan dijelaskan. Hal tersebut diukur dengan menggunakan empat indikator dalam proses pengembangan komponen Cooper, sebagai berikut:

1. Kelembagaan
2. Aksesibilitas
3. Amenitas
4. Daya Tarik

Dalam membahas pengembangan, Penulis menggunakan metode wawancara langsung dengan informan untuk membahas keempat indikator komponen pembangunan. Berikut hasil wawancara, sebagai berikut:

Kelembagaan

Kelembagaan memainkan peran penting dalam proses pembangunan. baik dari organisasi masyarakat maupun instansi pemerintah. Dalam rangka mendorong tumbuhnya hutan adat, pemerintah desa mampu menetapkan kebijakan, menyediakan fasilitas umum, dan menyediakan fasilitas penunjang. Kegiatan yang dapat memikat pengunjung ke lokasi menjadi tanggung jawab lembaga. Hasil observasi menunjukkan dengan kegiatan dari pengelola dalam mendukung pengembangan hutan adat sudah dilakukan memang belum secara total dan dilakukan bertahap. Dan lokasi hutan adat Imbo Putui juga pernah dikunjungi oleh pemerintah kabupaten Kampar.

Untuk menyadarkan masyarakat desa Petapahan bahwa hutan adat di lingkungannya memiliki sesuatu yang sangat besar untuk dikembangkan, maka dilakukan juga kegiatan penyadaran tentang hutan adat kepada masyarakat adat di kawasan tersebut, khususnya bagi para pemuda disana. Lembaga Pengelola Hutan Adat, Pemerintah Desa, Ninik mamak, dan masyarakat adat perlu bekerja sama dalam proyek-proyek yang akan mendukung pengembangan hutan adat. Sebagai orang yang dipercaya, pengelola bertanggung jawab untuk memastikan hutan adat terus berkembang, dan pengelolaan yang dilakukan selama ini positif. Begitu pula dengan mengembangkan kemampuan kelompok masyarakat

asli, khususnya kaum muda, agar mereka lebih imajinatif dan untuk mengembangkan yang dimiliki, sehingga dapat membantu pengembangan hutan adat tersebut.

Aksesibilitas

Kemudahan seseorang untuk mencapai lokasi dikenal sebagai aksesibilitas. Prasarana jalan sebagai salah satu jenis sarana transportasi yang digunakan wisatawan untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya menuju kawasan obyek wisata. Alat atau sarana transportasi yang digunakan wisatawan saat berkunjung ke suatu destinasi wisata juga termasuk dalam sarana transportasi ini. Bagi pengunjung, hal-hal seperti rambu-rambu jalan sangat penting. Hal ini dilakukan agar pengunjung yang tidak *familiar* dengan kawasan tersebut tidak merasa bingung. Kendaraan roda dua dan roda empat dapat digunakan untuk menuju hutan adat Imbo Putui dari perempatan Petapahan yang jaraknya sekitar 700-800 Meter dari hutan. Dari Pekanbaru, kawasan hutan berjarak sekitar 45 kilometer atau sekitar 60 menit perjalanan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas transportasi seperti jalan, rambu, atau rambu cukup memadai mengingat aksesibilitas yang dijelaskan di atas. Namun, tidak ada jalur perjalanan menuju hutan adat. Selain itu, sepihnya pengunjung dari lingkungan sekitar maupun dari luar yang ingin mengunjungi hutan akan memperparah dengan tidak adanya pilihan transportasi.

Amenitas

Amenitas atau fasilitas yang memberikan pelayanan bagi mereka yang ingin datang ke suatu daerah yang ingin dituju.

Berikut penjelasan amenities atau fasilitas sebagai berikut:

1. Akomodasi (Penginapan)

Pelayanan kepada pengunjung yang memerlukan tempat beristirahat selama berkunjung ke suatu wisata mengharuskan adanya fasilitas penginapan dalam pengembangan kawasan hutan adat. Fasilitas disekitar hutan adat Imbo Putui belum cukup memadai. Pembangunan untuk penginapan yaitu gazebo belum selesai, dikarenakan dana yang tidak cukup. Oleh karena itu untuk melanjutkan pembangunan harus menunggu bantuan dana, atau pemasukan kas dari hutan adat itu sendiri. Dan tentunya untuk penginapan sendiri memang diperlukan dalam pengembangan hutan adat, ini akan menjadi tempat beristirahat yang baik untuk pengunjung yang akan berkunjung.

2. Guide (Pemandu)

Guide juga dikenal sebagai pemandu wisata atau pendamping, sangat penting di setiap lokasi, khususnya di hutan tradisional. Ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan penjelasan kepada pengunjung. Pemandu berperan penting, dengan mengarahkan melalui pelayanan yang diberikan pihak orang yang dipercaya bahwa serius melakukan

yang baik bagi pengunjung. Memiliki *guide* dapat membantu dengan apa yang dibutuhkan atau diminta oleh orang yang datang ke wisata.

3. Toilet Umum

Toilet umum merupakan prasarana yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu tempat. Pelayanan berupa jamban umum di sekitar hutan adat sudah memadai mengingat sudah ada jamban portable dan pembangunan jamban umum tersebut akan selesai pada tahun 2023. Tentu hal ini sangat baik sebagai penunjang pembangunan hutan adat di hutan adat Imbo Putui dengan memungkinkan dilakukannya berbagai kegiatan di sana.

4. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi memungkinkan pengunjung untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak dan juga dapat memberikan arahan secara online jika menemui kesulitan di lokasi tersebut. Di sekitar hutan adat Imbo Putui, sarana pelayanan berupa jaringan telekomunikasi dapat diakses dengan baik dan memadai, membantu masyarakat adat maupun pengunjung.

5. Mushola

Pengamatan peneliti terhadap masjid di hutan adat Imbo Putui menunjukkan adanya fasilitas untuk tempat ibadah. Mengingat kita sebagai umat yang punya agama dianjurkan menjalankan ibadah. Fasilitas untuk beribadah juga tentu penting dan menjadi fasilitas penunjang juga.

Daya Tarik

Destinasi wisata merupakan hal penting dalam menarik pengunjung ke lokasi yang ingin mereka kunjungi. Beberapa kegiatan di hutan tersebut, sebagai berikut :

1. Destinasi Ekowisata

Sungai mungkin menjadi sumber pendapatan bagi mereka yang berjualan di sana, namun lembaga pengelola hutan adat masih berkonsentrasi untuk mengembangkan hutan itu sendiri, sehingga tidak ada penjual di kawasan tersebut. Selain itu, karena pengelola tidak mengizinkan penjualan, pengelola menyarankan untuk tidak menjual pengunjung saat ini karena rendahnya jumlah pengunjung yang sering berkunjung ke hutan adat. Beberapa pengunjung datang pada waktu yang tidak ditentukan, sementara yang lain hanya ingin melihat hutan adat dan mengikuti kegiatan kelompok di sana.

2. Camping

Berkemah adalah kegiatan membuat rumah sementara di alam terbuka, di gunung, atau di hutan. Memang berkemah lebih disukai karena kegiatan di luar ruangan ramah lingkungan atau sekedar mencoba bentuk rekreasi. Anda akan membayar Rp untuk menyewa tenda dengan kasur. 50.000/malam dan jika membawa oven akan dikenakan biaya Rp. 100.000/malam. Karena baik pengunjung maupun masyarakat adat bisa merasakan bermalam di ruang terbuka.

3. Menjelajah Hutan

Menjelajahi hutan bukanlah hal yang sembarangan. Kalau bicara soal hutan, pendamping memang diperlukan, apalagi ini adalah hutan adat yang aturan dan budaya daerahnya harus dipatuhi. Ada berbagai jenis tanaman dan hewan di hutan seluas 251 hektar ini, termasuk pohon kulim. Pengunjung diharapkan untuk mengikuti aturan karena hutan ini masih kuat secara mistis dan bekerja sama untuk mengikuti aturan. Berani atau tidak, menjelajahi hutan mempertajam ketahanan mental kita dan memperluas pengetahuan kita tentang alam, menjadikannya kegiatan yang sangat baik bagi pecinta alam.

4. Budidaya Tanaman Hutan

Pembudidayaan Tanaman Hutan Sebagai orang yang bertugas menjaga dan mengelola hutan ini, lembaga pengelola telah bekerja dengan baik. Ini memberi hutan itu sendiri kehidupan baru dengan membudidayakan tanaman, memungkinkan hutan untuk terus berproduksi. Selain itu, budidaya hutan berfungsi untuk menghasilkan hutan yang sehat di samping memenuhi kebutuhan hasil hutan. Kami sadar bahwa pohon, baik kayu maupun non kayu, menyediakan air bersih, sehingga bermanfaat bagi manusia.

5. Budidaya Madu Kelulut

Salah satu strategi penanaman hutan adat Imbo Putui adalah melalui budidaya madu kelulut. Untuk sementara, pengelola sendiri yang membeli lebah untuk budidaya madu kelulut. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengambilan madu kelulut yang bersumber dari hutan, karena tindakan tersebut mengharuskan penebangan pohon, yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, untuk memenuhi hal tersebut, pengelola membeli lebah dan membudidayakan madu kelulut dari kayu yang sudah ada di hutan sambil mencari cara untuk mengekstraksi sumber daya hutan. Selain itu, setelah dipanen akan dijual dan dimanfaatkan untuk pembangunan hutan adat Imbo Putui.

6. Program Adopsi Pohon

Salah satu cara yang digunakan Lembaga Pengelola Hutan Adat untuk mengembangkan hutan adat adalah program penanaman pohon. Orang mengadopsi pohon untuk merawatnya, yang berarti jual beli oksigen. Selain itu, dibagi menjadi dua kategori untuk diadopsi: pohon dengan diameter 40 meter atau lebih dihargai 200 ribu dolar per pohon, sedangkan pohon dengan diameter kurang dari 40 meter dihargai lima puluh ribu dolar per pohon. Selain itu, pohon meranti, batu, bunga, entangu, kuranji, dan kosiok telah diadopsi. Selain itu, kegiatan adopsi pohon dapat dilihat di website adoptpuppriau.org yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan dikelola oleh Yayasan Adopsi Pohon Riau.

Faktor – Faktor Penghambat Pengembangan Wisata Hutan Adat Imbo Putui di Desa Petapahan Kecamatan Tapung

1. Anggaran atau Dana

Perlu dikembangkan pembangunan di sekitar hutan adat untuk menarik kenyamanan pengunjung agar pembangunan hutan adat berjalan sesuai rencana. Karena hutan adat Imbo Putui membutuhkan banyak uang untuk dikembangkan, maka Lembaga Pengelola Hutan Adat harus pandai menjual barang-barang di hutan, apalagi tahun ini tidak banyak orang mengunjungi, sehingga kurang menguntungkan. Akibatnya, pembangunan tidak dapat dilakukan dengan baik. Ninik mamak, masyarakat adat, dan Pemerintah Desa diharapkan lebih memperhatikan pengembangan kawasan hutan adat agar pengunjung dapat menikmatinya dengan nyaman dan dapat tumbuh dengan baik.

2. Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola hutan adat Imbo Putui sangat penting untuk pengembangan potensi hutan sebagai tujuan wisata. Hutan adat Imbo Putui memiliki sedikit sumber daya manusia. Tidak ada kesadaran masyarakat adat untuk mendukung dan untuk membantu dalam pengembangan hutan adat. Akibatnya, masyarakat adat harus secara aktif dan rela berpartisipasi dalam pertumbuhan hutan adat. Adanya hasil kreasi masyarakat adat sendiri yang memungkinkan masyarakat berkembang dan tentunya lestari juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Semuanya dipengaruhi oleh peran masyarakat, karena kegiatan wisata akan sepi jika masyarakat pasif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa hutan adat Imbo Putui sudah dikembangkan, namun belum cukup optimal. Kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik, namun pengembangannya belum dilakukan dengan baik, seperti peningkatan fasilitas dan aksesibilitas. sehingga pelaksanaan yang diarahkan dan ditetapkan oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Adat terkena dampaknya. Anggaran atau dana yang menghambat pengembangab dan membutuhkan proses yang panjang serta kurangnya sumber daya manusia untuk berpartisipasi dalam pembangunan hutan adat menjadi penghambat.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). metode penelitian kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 4(1), 88–100.
- Fardhuni, W. (2020). strategi pengembangan pariwisata pacu jalur menuju event nasional di kabupaten kuantan singingi. *Ilmu Administrasi Publik*, 39–40.
- Heryati, Y. (2019). Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tapandullu Di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 56–74. <https://stiemmamuju.ejournal.id/GJIEP/article/view/10>
- Kurnia, R. (2015). Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bukittinggi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (PAD), 32.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Lestari, R. (2022). Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kampar. 691–709.
- Mayarni, M., Siregar, S. H., Khoiri, M. A., & Nasution, M. S. (2023). Tata Kelola Kawasan Mangrove Terintegrasi Dalam Perspektif Governance Di Indonesia Kajian Teoritis Dan Empiris. In *Repository.Unri. Ac.Id* (Issue January).
- Rizal, M., Saputra, dani nur, & lis hafrida. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Sugiyono. (2008). metode penelitian kualitatif. ALFABETA, CV.
- (2020). metode penelitian kualitatif (KE 3). ALFABETA, CV.
- Suwantoro. (1997). *Dasar dasar Pariwisata*. PT. Gramedia.
- Tarman, R. N. (2013). Strategi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Agrowisata Taman Hutan Rakyat Abdul Latief (Athral) Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Trisna Satria. (2020). Pengembangan wisata heritage di kota pekanbaru (studi kasus di kelurahan, kampung Bandar kecamatan senapelan). *Ilmu Administrasi Publik*.
- Yoeti, O. (2016). perencanaan dan pembangunan pariwisata. PT. Balai Pustaka Persero.
- Zulkifli, Z. (2017). Pengembangan Kawasan Wisata Dam Bili-bili Berbasis Masyarakat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. 180. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/7213>